

**PROBLEMATIKA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA DI KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Disusun Oleh:
LANO SATRIO
19520190**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”




Yogyakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 22 September 2023

Jam : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
<u>1. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si</u>	
Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>2. Dr. Rijel Samaloisa</u>	
Penguji Samping I	
<u>3. Analisis Giawa, S. IP., M.Si</u>	
Penguji Samping II	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lano Satrio

Nim : 19520190

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Problematika Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, September 2023



MOTTO

Semangat belajar adalah awal dari keberhasilan setiap orang apabila dapat menekuni dan menghargainya .

(Lano Satrio)

Tuhan, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong:

Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar

Atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku.

(Mazmur 131:1)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan semua ini teruntuk yang kucintai

Mereka yang bercucur keringat demi aku,

Mereka yang berdoa tanpa aku memintanya,

Mereka terkadang sakit karena aku,

Mereka yang tiada henti mengajarku menghargai pentingnya pendidikan,

Mereka adalah kedua orang tuaku

Papaku, Pardamean Saogo dan Mamaku, Cince Taileleu

Abangku

Hendro Mantra Saogo

Echo Dilus Saogo

Ucapan terimakasih sepertinya tidak cukup untuk menggambarkan dukungan kalian atas semua perjuanganku hingga saat ini. Semoga sukacita Tuhan Yesus menyertai semua dukungan yang diberikan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus berkat bimbingan dan penyertaan-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Problematika Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa”. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Kepada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
2. Kepada Bapak Dr. Rijel Samaloisa, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Kepada Bapak Dr. Rijel Samaloisa, M.Si serta Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si yang sudah bersedia menguji skripsi ini.
4. Kepada Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membantu, membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada Staf Pengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepada Pemerintah Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan ruang yang luas kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada Pemda Mentawai yang sudah membimbing dan membantu membuka ruang jalur beasiswa kepada penulis sehingga bisa menimba ilmu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Kepada sahabat Almamater Angkatan 2019 Prodi Ilmu Pemerintahan.

9. Kepada Keluarga Tercinta, Bapak Besli Saogo, Bapak Marimin Taileleu, Bapak Jamin Taileleu, Bapak Junaidi Saogo, Tante Usen Lebing, Abang Yobel Saogo, serta Om, Tante, Kakak dan Abang lainnya yang memberi dukungan kepada penulis.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta, Seven Metusala S.IP., M.IP, Boni Vasius S.Sos, Desan S.IP, Mery Elina S.IP, Beni Cardo S.Sos, Iska Elma S.Sos, Ruyandi, Maria, Resta Gregoria, Jekson, Roger, Aples, Sumita, Indra, Merkel Saogo, Remin, Audy, Afriskila, Desmil, Maikel, Belthazar, Luti, Eyling, Lenda, Pangki, Lauren.
11. Kepada teman-teman yang tergabung dalam organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Mentawai Yogyakarta (HPMM).

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dalam menyajikan tulisan ilmiah yang baik. Besar harapan penulis kepada para pembaca berupa masukan dan kritikan yang membangun guna perbaikan dan kesempatan skripsi ini.

Yogyakarta, 2023

Penulis,

Lano Satrio

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Literatur Riview.....	12
E. Kerangka Konseptual	26
1. Pengertian Perencanaan.....	26
2. Pengertian Pembangunan	31
3. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa	35
F. Ruang Lingkup	39
G. Metode Penelitian.....	40
BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL	47
A. Sejarah	47
A. Geografis	49
B. Demografi.....	50
C. Kesehatan	53
D. Transportasi	53
E. Pariwisata	54
F. Pemerintahan Kalurahan.....	54
G. Visi Misi	59

H. Struktur Organisasi.....	62
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KALURAHAN NGLINDUR	63
1. Menetapkan Target atau Tujuan	64
2. Merumuskan Keadaan Saat Ini	69
3. Mengidentifikasi Segala Kemudahan dan Hambatan.....	73
4. Mengembangkan Rencana atau Serangkaian Kegiatan Untuk Pencapaian Tujuan.....	77
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Subjek Penelitian	42
Tabel 2. 1 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	51
Tabel 2. 2 Statistik Penduduk Kalurahan Nglindur	52
Tabel 2. 3 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan di Kalurahan Nglindur	52
Tabel 2. 4 Data Pamong Kalurahan Menurut Tingkat Pendidikan di Kalurahan Nglindur 2022	55
Tabel 2. 5 Proyeksi Jumlah Pamong Kalurahan Nglindur Tahun	56
Tabel 2. 6 Daftar Padukuhan, RW, RT Kalurahan Nglindur Tahun 2022	57

INTISARI

Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 1 ayat 10 bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serta memberi amanah pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Objek penelitian ini adalah Problematika Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut : (1) untuk menentukan target atau tujuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sudah jelas, kemudian dalam merencanakan kegiatan tahunan Pemerintah Kalurahan Nglindur mengacu pada RKP Desa di dalam dokumen RPJMDesa. (2) untuk merumuskan keadaan saat ini dalam perencanaan pembangunan desa sudah berdasarkan hasil dari musyawarah setiap Padukuhan di Kalurahan Nglindur. (3) dalam perencanaan pembangunan desa sudah mengidentifikasi baik itu kemudahan maupun hambatan yang muncul. (4) dalam mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan sudah dilakukan dengan berbagai alternatif agar tujuan yang direncanakan tercapai, begitu juga pada kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya selalu dilakukannya evaluasi.

Kata-kata Kunci : Penyusunan, Perencanaan, Pembangunan Desa, Kalurahan Nglindur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membangun. Pembangunan pada hakikatnya adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya haruslah melibatkan masyarakat dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, dalam konsep pertumbuhan, pemanfaatan pembangunan adalah pelaku usaha besar. Dalam konsep distribusi pembangunan, pemanfaatan pembangunan adalah rakyat pada level akar rumput. Maka dari itu, penerapan konsep pemberdayaan masyarakat akan mampu menjawab tantangan melaksanakan distribusi pembangunan secara lebih baik. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ini akan dikenal sebagai *distribution With growth*. Akhirnya, pemberdayaan ditantang untuk dapat menjamin distribusi aset pembangunan secara merata dengan proses dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa menggunakan dua

pendekatan, yaitu ‘desa membangun’ dan ‘membangun desa’ yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Sebagai Konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong-royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam Pasal 79 UU No. 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai

kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa menyatakan perencanaan Pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Dalam Panduan Pelatih/Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, 2015:98). Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus desanya sesuai dengan kewenangannya sebagai desa *self governing community*. Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Desa tidak lagi selalu menunggu “*menunggu perintah atasan*” dalam menyelenggarakan urusan dirinya sendiri. Ada keberanian ada kreativitas serta inovasi yang terumuskan dalam dokumen perencanaan yang legal di desa. Menurut UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara

partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Sesuai amanat UU Desa pasal 54, Musyawarah Desa wajib diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mendiskusikan dan memutuskan hal-hal strategis desa. Ada hal strategis desa yang harus dibahas ketika muncul dan atau dibutuhkan desa seperti pendirian/pembubaran BUMDesa, pengelolaan/pelepasan/pemberian aset desa, kerjasama antar desa dan pembahasan RPJMDesa. Musyawarah desa sangat penting dalam mewujudkan demokrasi berlandaskan musyawarah (deliberative democracy) dimana keputusan-keputusan penting menyangkut kehidupan warga desa tidak hanya keputusan oleh pemerintah desa melainkan oleh seluruh komponen masyarakat.

Berikutnya, pembangunan adalah sebuah orientasi dalam kegiatan usaha yang tanpa akhir. Pembangunan merupakan suatu proses mewujudkan cita-cita bernegara yaitu masyarakat yang makmur, adil, sejahtera dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya pendapatan. Pembangunan bukan berarti peningkatan pendapatan saja, tetapi pembangunan merupakan suatu proses multi dimensi yang meliputi proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Menurut Loekman Soetrisno, pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana, perubahan tidak hanya diharapkan terjadi pada kehidupan masyarakat, melainkan juga Pada peranan unsur-unsur yang terlibat dalam

proses pembangunan, yaitu negara dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan hanya tidak diukur dari seberapa jauh pembangunan tersebut meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga dilihat dari besarnya keinginan dan kemampuan yang ditimbulkan untuk mandiri, dalam arti ada kemauan masyarakat untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha-usaha mereka sendiri maupun dari luar.

Pembangunan Desa ditujukan agar penduduknya bukan hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atas suatu produk lainnya, tetapi juga mampu memberikan kelimpahan atau surplus produksi sebagai sumbangan ke daerah lain dan kota atau daerah yang membutuhkan produk yang dihasilkan di kawasan pedesaan. Untuk itu, desa harus mempunyai produk-produk unggulan yang dapat dihasilkan secara surplus oleh penduduk yang ditingkatkan kualitasnya melalui pemberdayaan. Dengan demikian akan terdapat suatu jaringan industri dan perdagangan atau jaringan ekonomi pedesaan yang lebih berkembang sehingga terdapat aliran produksi jasa, uang dan barang yang dapat menghidupkan kawasan pedesaan.

Secara konseptual, pembangunan desa ditujukan pada usaha percepatan pembangunan diseluruh bidang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan hasrat untuk menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Dalam pembangunan desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk terselenggaranya pembangunan. Partisipasi masyarakat didasarkan pada kemampuan sendiri,

artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan desa atas dasar keyakinan dan kesadaran sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang tinggi

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan desa dapat memenuhi apa yang diinginkan, maka diperlukan suatu perencanaan. Penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip-prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari masyarakat, oleh, dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah-masalah yang ada atau dihadapi di dalam wilayahnya masing-masing. Selain itu, diperlukan juga kemampuan dari masyarakat setempat untuk mencari jalan keluar atau memecahkan permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Potensi-potensi yang dimiliki wilayah wilayah tersebut juga harus dikenali, digali dan dikembangkan untuk pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa merupakan rumusan mengenai tahapan yang harus dilalui dalam mengidentifikasi masalah, potensi dan kebutuhan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat untuk dijadikan program/kegiatan yang didanai dengan uang publik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 1 ayat 10 bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan desa serta memberi amanah pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan berdasar pada usulan dari masyarakat, tidak hanya berupa asumsi dan perkiraan saja dari aparat desa. Selain itu, proses perencanaan pembangunan desa juga perlu diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan.

Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Pada hakekatnya tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Pada problem penyusunan perencanaan pembangunan terjadi di Kalurahan Nglindur Kapanewon Giri Subo Kabupaten Gunungkidul, terutama pada partisipasi masyarakat. Seperti mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang direncanakan mulai dari tingkat RT sampai pada Musrenbang Desa belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk

menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Pembangunan yang sekarang ini dikembangkan di desa yakni pembangunan partisipatif. Pembanguna partisipatif merupakan pola pembangunan yang telah lama dilaksanakan oleh bangsa ini jauh sebelum kemerdekaan, dan masyoritas masyarakat desa sudah menjadikan hal tersebut sebagai budaya, seperti melaksanakan kegiatan gotong royong, kerja bakti, serta tanggung renteng (partisipasi). Namun pola yang dikembangkan merupakan penyerpunaan dari bentuk sebelumnya dengan lebih terpadu, terencana dan sistematis.

Berbagai program seperti sifatnya penanggulangan kemiskinan, bantuan kesehatan, pendidikan, pembangunan fisik dan sebagainya yang pernah ada, sering berupaya untuk menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Namun realitasnya, sebagian besar pelaksanaannya terjebak dengan pendekatan formalitas partisipasi, dimana rancangan dan proses kegiatan yang dilakukan lebih banyak ditangani pihak luar atau setidaknya didominasi oleh segelintir oknum masyarakat setempat. Sehingga hasil yang diharapkan misalnya ada proses pembelajaran dan keaktifan bagi masyarakat serta hasil yang diperoleh berupa terangkatnya permasalahan

secara murni seringkali tidak muncul dalam konteks tersebut. Masalah dan potensi serta pelibatan masyarakat melalui suatu pendekatan yang kemudian dinamakan pola perencanaan pembangunan partisipatif. Fokus utama dari pendekatan perencanaan adalah masyarakat bersinergi dengan permasalahan desa dan potensi yang dimilikinya secara bersama, dengan demikian hasil dari setiap tahapan pembangunan bisa lebih mebumi.

Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63 ayat 2 PP 72/2005 tentang desa). Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita-cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, dokumen tersebut harus disusun secara sistematis, terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga desa. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJMDesa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005). RPJMDesa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) sekaligus dengan penganggarannya

dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini RKP dan APB Desa merupakan hasil (output) dari Musrenbang tahunan desa.

Untuk itu, pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih merata. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi Daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang dinamis, serasi, nyata dan bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya sebagai bentuk dari kebutuhan yang kuat untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul harus mampu meningkatkan pembangunan guna memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kerana itu pembangunan desa dengan segala permasalahannya merupakan pembangunan yang langsung berkaitan dengan sebagian terbesar masyarakat yang berada di tingkat desa dapat mencapai tujuan dan menuju kearah yang lebih baik bagi masyarakatnya. Dengan demikian, untuk meningkatkan pembangunan yang merata dan akan berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama antara stakeholder dan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal, bahwa ada kecenderungan usulan yang diajukan dalam Musrenbang Desa merupakan rumusan elite desa dan

sebagian kecil tokoh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Kegiatan Musrenbang Desa yang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Kalurahan Nglindur nyatanya hanya merupakan kegiatan formalitas yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan sebagian kecil tokoh yang sama sekali tidak mewakili keseluruhan masyarakat Kalurahan Nglindur. Dari persoalan hal tersebut, penting untuk diteliti problematika Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan permasalahan penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul.

Hasil penelitian yang sajikan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun untuk kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan dan melengkapi pembahasan tentang problematika penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul.

2. Manfaat Praktis:

a. Manfaat Bagi Akademik

Manfaat bagi akademik dalam penelitian adalah untuk memberikan pemikiran pada penelitian lain tentang perencanaan pembangunan desa terkait masalah penyusunan perencanaan pembangunan desa.

b. Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan sumbangan terhadap Pemerintah Desa di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul terkait masalah potensi dan kebutuhan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa.

D. Literatur Riview

Penelitian ini menjelaskan problematika dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kalurahan Nglindur Kapanewon

Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Keaslian penelitian memberikan gambaran perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, dan data-data yang ada setidaknya memberikan gambaran awal kondisi yang berkaitan dengan tema peneliti. Untuk mendukung teori yang telah dikemukakan diatas, berikut ini disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan antara lain:

1. Penelitian Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi dan Nina Angelia (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bandar Klippa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dengan proses perencanaan guna tercapainya pembangunan yang dicita-citakan dalam era otonomi daerah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan aspek kewilayahan, sosial masyarakat hingga aspek ekonomi masyarakat menjadi fokus utama dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan, desa Bandar Klippa memiliki langkah perencanaan yang baik dan matang ditandai dengan proses melibatkan masyarakat. Di Desa Bandar Klippa saat ini dalam perencanaan pembangunan kerjasama selalu terjalin, kerjasama yang dilakukan pemerintahan desa biasanya dilakukan pertemuan atau rapat desa (Musrenbang Desa). Peresamaan penelitian dengan penelitian yang

dilakukan oleh Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi dan Nina Angelia (2019) terletak pada teknis analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan tema penelitiannya yaitu perencanaan pembangunan desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Yoga Teja Wiguna, Rosmala Dewi dan Nina Angelia (2019) terletak pada judul penelitian, tahun penelitian, tempat penelitian serta subjek penelitian.

2. Penelitian Andi Ariadi (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Desa”. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Teknis analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep perencanaan dan pembangunan desa dalam perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa memiliki pemerintahannya sendiri serta desa memiliki kewenangan dalam membuat peraturan sendiri. karena pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Ariadi (2019) terletak pada tema penelitian Perencanaan Pembangunan Desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan Andi Ariadi (2019) terletak pada pada judul penelitian, tahun penelitian, tempat penelitian serta subjek penelitian.

3. Penelitian Agustina Setiawan, Utang Suwaryo dan Mudiwati Rahmatunnisa (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung” . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prosedur formal pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan konsep perencanaan dan pembangunan desa. Penelitian ini akan mengeksplorasi partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung. Partisipasi masyarakat yang dimaksud lebih pada menggali proses keterlibatan dalam mengemukakan pendapat, dan kesempatan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan dan program pembangunan desa di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa, bukan pula membuat sekedar daftar usulan tanpa alasan yang logis, karenanya penting bagi para perencana kebijakan pembangunan desa melihat prinsip perencanaan desa seperti, berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, berkelanjutan, partisipatif dan demokratis serta keterbukaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Agustina Setiawan, Utang Suwaryo, dan Mudiwati Rahmatunnisa (2020) terletak pada topik penelitian yaitu

perencanaan pembangunan desa. sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Agustina Setiawan, Utang Suwaryo, dan Mudiyati Rahmatunnisa (2020) terletak pada judul penelitian, tahun penelitian, tempat penelitian dan subjek penelitian.

4. Penelitian Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda dan Beby Masitho Batubara (2021) dengan penelitiannya yang berjudul “partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Karang Gading”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Karang Gading masih rendah karena dalam kegiatan Musrenbang Desa masyarakat masih belum sepenuhnya menghadiri undangan pada pelaksanaan musrenbang desa didasari dengan beberapa masalah salah satunya yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda dan Beby Masitho Batubara (2021) terletak pada topik penelitian yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda dan Beby Masitho Batubara (2021) terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tahun penelitian serta subjek penelitian.

5. Penelitian Rudiadi, Abdiana Ilosa dan Saipul Al Sukri (2021) dengan penelitiannya yang berjudul “Optimasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Sekeladi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa di Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan mendapatkan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa hakikatnya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, karena pemerintah desa merupakan organisasi yang terdiri dari atas Kepala Desa dan unsur perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang kuat hanya dapat terwujud jika partisipasi masyarakat lokal desa sangat tinggi dalam pembangunan desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudiadi, Abdiana Ilosa dan Saipul Al Sukri (2021) terletak pada topik penelitian yaitu pembangunan desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudiadi, Abdiana Ilosa dan Saipul Al Sukri (2021) terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tahun penelitian serta subjek penelitian.
6. Penelitian Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, dan Khoirul Abidin (2021) dengan penelitiannya yang berjudul “Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) di Desa Setro Kecamatan Manganti, Kabupaten Gresik”. Teknik analisis data yang

digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengabdian berupa penyuluhan dan pendampingan para peserta yang terdiri dari perangkat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta tokoh masyarakat desa Setro. Pelaksanaan kegiatan dalam penelitian ini adalah memberikan penyuluhan materi RKP Desa dengan teknik *brainstorming* (curah pendapat) yaitu teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian suatu masalah dengan mengumpulkan gagasan dari peserta. Pendampingan dilakukan dengan *Focus grup discussion* bersama perangkat desa setro yang memberikan kontribusi evaluasi dokumen RKP Desa setro serta mencari penyelesaian permasalahan dan kendala yang terjadi saat penyuluhan RKP Desa Setro. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, dan Khoirul Abidin (2021) terletak pada topik penelitian yaitu penyusunan rencana kerja Pembangunan Desa. sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Erna Hendrawati, Mira Pramudianti, dan Khoirul Abidin (2021) terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tahun penelitian serta subjek penelitian.

7. Penelitian Herman (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “ Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan desa di Desa Ulidang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep perencanaan pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pembangunan desa, salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya visi dan misi dalam pembangunan desa adalah tingkat partisipasi masyarakat yang berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan, sebab tanpa keterlibatan langsung pihak masyarakat dan swasta yang membantu pemerintah dalam menyusun dan melakukan perencanaan pembangunan desa, maka segala visi dan misi yang ditetapkan dalam pembangunan tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman (2019) terletak pada tema penelitian yaitu perencanaan pembangunan desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman (2019) terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tahun penelitian serta subjek penelitian.

8. Penelitian Dani H. Lambuaso, Sofia Pangemanan, dan Donald Monitja (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan

untuk menunjang adanya pembangunan desa. pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan akan semakin tinggi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dani H. Lambuaso, Sofia Pangemanan, dan Donald Monitja (2020) terletak pada tema penelitian dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah subjek penelitian, tempat penelitian, dan tahun penelitian.

9. Penelitian Agung Manghayu (2018) dengan penelitiannya yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan E-Musrenbang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menerapkan E-Musrenbang desa dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem E-musrenbang membawa beberapa dampak positif seperti, meningkatkan kualitas layanan pemerintah desa, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas dalam hubungan pemerintah kepada warga negara dan pemerintah kepada pemerintah serta mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Persamaan penelitian ini terletak pada teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan

penelitian terletak pada subjek penelitian, tahun penelitian, tempat penelitian dan jumlah informan.

10. Penelitian Ferry Setiawan (2023) dengan penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa) di Desa Tumbang Bantian”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas ciri-ciri objek dan objek penelitian, menemukan gejala yang ada di masyarakat, terkait dengan pelaksanaan refleksi dalam rencana pembangunan desa (musrenbang Desa). kemudian ingin melihat secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif dengan mengkaji Bagaimanakah Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Teknik analisis data yang dilakukan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan sebagai usaha dan referensi dalam mengupayakan yang direncanakan dan sadar oleh sebuah negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam konteks pembangunan (Siagian, 2008). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ferry Setiawan (2023) terletak pada topik pembahasan dan teknik analisis data serta tahun penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian jumlah informan dan subjek penelitian.
11. Penelitian Wayan Mahayana (2013) dengan penelitiannya yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa

Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan diwilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Kerana peran kepala desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wayan Mahayana (2013) terletak pada tema penelitian yaitu, pembangunan desa dan metode penelitian. sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Wayan Mahayana (2013) terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tahun penelitian dan subjek penelitian.

12. Penelitian Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo (2017) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara”. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada desa Suwaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah desa Se- kabupaten Minahasa Utara. Selain berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara, Penerapan Alokasi Dana Desa juga sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo (2017) terletak pada teknik analisis data. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti Ruru, Lintje Kalangi, dan Novi S. Budiarmo (2017) terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian.

13. Penelitian Kamaruddin, I Nyoman Utama, dan Suhaima (2021) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan desa di desa Batu Rotok. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sangat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa baik dari sisi kehadiran dalam rapat, memberikan pendapat dalam rapat, mengkritik arah

perencanaan pembangunan, serta keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin, I Nyoman Utama, dan Suhaima terletak pada topik penelitian dan teknik analisis data. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamaruddin, I Nyoman Utama, dan Suhaima terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tahun penelitian serta subjek penelitian.

14. Penelitian Nila Sylvi Ratnadila (2018) dengan penelitiannya yang berjudul “Perencanaan Skenario Untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun perencanaan skenario dengan permasalahan pembangunan desa tertinggal melalui optimalisasi modal dan peran pelaku pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada konsep dasar pembangunan desa tertinggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya kesinambungan dan kerjasama yang terarah antara pelaku pembangunan dan juga pemerintah untuk realisasi dari SP. Karena dengan adanya SP akan mengurangi dampak dari ketidakpastian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Nila Sylvi Ratnadila terletak pada teknik analisis data. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nila Sylvi Ratnadila terletak pada judul dan subjek penelitian serta tahun penelitian.

15. Penelitian Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, Trisakti Handayani (2019) dengan penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang; (2) kendala dari kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang; (3) solusi dari permasalahan kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang cukup sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan desa. (2) kendala yang terjadi pada kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang berupa tidak semua bagian dalam lembaga tersebut memiliki kegiatan di tiap tahunnya. (3) solusi untuk mengatasi kendala pada kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa Bululawang adalah melakukan evaluasi baik kepada pribadi anggota maupun kelompok. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani terletak pada teknik analisis data.

Sedangkan perbedaannya terletak pada judul penelitian, tahun penelitian, lokasi penelitian serta subjek penelitian.

Berdasarkan analisis pada beberapa studi terdahulu, maka penelitian ini berjuan untuk menutup celah penelitian tersebut terutama berkaitan dengan Problematika Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Perbedaan analisis ini dengan analisis pada beberapa studi terdahulu terletak pada topik penelitian serta subjek penelitian. Posisi peneliti terhadap penelitian beberapa studi terdahulu adalah untuk menjelaskan masalah tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perencanaan

Menurut Alexander Abe (2002: 24-25) Perencanaan adalah berasal data kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan (untuk masa depan)

dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

Defenisi perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), adalah perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan merupakan suatu cara berpikir yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial-ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa yang mendatang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Beberapa ahli lain merumuskan perencanaan adalah pemikiran hari depan, perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.

Perencanaan adalah suatu persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah, kita harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kita harus melihat sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik

dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut.

Bintoro Tjokroaminoto dalam Husaini Usman (2008) menyebutkan, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman (2008) juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, dimana, dan bagaimana cara melakukannya.

Sementara Widjojo dalam Lembaga Administrasi Negara (1985: 31), menjelaskan perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal:

- a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula.

Perencanaan merupakan suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan Becker (2000) dalam Rustiadi (2008: 339).

Sedangkan menurut Alder dalam Rustiadi (2008: 339) menyatakan bahwa: Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk tujuan tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah dan langkah-langkah terbaik untuk mencapainya.

Defenisi perencanaan dikemukakan oleh Erly Suandy (2001: 2) sebagai berikut: secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan pereusahaan secara menyeluruh. Defenisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.

Berikutnya dalam perencanaan mempunyai tahapan-tahapan, antara lain:

- a. Menetapkan Target atau Tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.
- b. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi-terutama keuangan dan data statistik yang dapat melalui komunikasi dalam organisasi.
- c. Mengidentifikasi Segala Kemudahan dan Hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intren dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menumbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan

kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

- d. Mengembangkan Rencana atau Serangkaian Kegiatan Untuk Pencapaian Tujuan, tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

2. Pengertian Pembangunan

Secara umum kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik. Bahkan pada masyarakat kecil, pembangunan mempunyai makna yang khas, seperti makna kata pembangunan yang sering kita temukan di berbagai tempat yang tertulis pada papan peringatan di tepi-tepi jalan: hati-hati sedang ada pembangunan *gedung*, jalan raya, jembatan, rumah ibadah, dan sebagainya. Selo Sumardjan bahkan menceritakan tentang makna pembangunan pada masyarakat kecil yang unik itu seperti cerita seorang penduduk miskin disebuah kota kecil di luar Jakarta. “Saya dulu tinggal di Jakarta. Akan tetapi, karena ada pembangunan, saya terpaksa mengungsi kemari”. (Arief Budiman. 1996. Hal 1).

Ukuran fisik itu menjadi ukuran bagaimana anggapan bahwa pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan di

negeri ini, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Jalan-jalan lebar dan mulus telah dibangun, berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, pendidikan, PDAM, dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga berbagai sarana kemudahan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi.

Oleh karena pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik, jadi secara umum makna pembangunan merupakan usaha untuk mewujudkan hidup yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh suatu negara “an increasing attainment of one’s own cultural values” (Tjokrowinoto,1996: 1). Berikut yang disebut sebagai cita-cita bangsa. Untuk itu, merujuk pada konsepsi kenegaraan, tujuan pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila ke-lima (5) Pancasila.

Selanjutnya, pembangunan sangat berkaitan dengan nilai, dan acapkali bersifat transendental, suatu gejala meta disiplin, atau bahkan sebuah ideologi (*The Ideology Of Developmentalisme*). Oleh karena itu, para perumus kebijakan, perencana pembangunan serta para pakar-pakar selalu dihadapkan nilai (*Valeu Choice*), mulai pada pilihan epistemologis-ontologi sebagai kerangka filosofis nya, sampai pada derivasi nya pada tingkat strategi, program, dan proyek. Pokok pikiran pembangunan terfokus pada cita-cita Keadilan Sosial. Sehingga, pembangunan butuh proses dan tahapan yang terukur. Tahapan itu harus

dapat menyentuh bermacam bidang, yakni *pertama* ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materil. *Kedua*, adalah tahap kesejahteraan sosial. *Ketiga*, merupakan tahap keadilan sosial.

Menurut Dissaynake (1984), mendefenisikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan cultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri. Sedangkan menurut Syamsi Yuswar, Zainal Basri dan Mayuni Subri (2006: 15), pembangunan adalah proses perubahan sistem direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat

maupun daerah harus memperlihatkan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional (S.P. Siagian 2005).

Pembangunan adalah kegiatan komersial atau serangkaian komersial yang direncanakan secara sadar dan dilakukan oleh rakyat, negara, dan pemerintah sehubungan dengan pembangunan bangsa. Selanjutnya, pembangunan merupakan suatu upaya perubahan, berdasarkan pilihan posisi tertentu, yang tidak lepas dari pengalaman (sejarah), realitas situasi dan kepentingan para pihak yang mengambil keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki arti ganda, yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan yang berfokus pada masalah kuantitas produksi dan penggunaan sumber daya. Kedua, pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan distribusi barang serta peningkatan hubungan sosial.

Dari definisi ini terlihat bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai tujuan nasionalnya tanpa berbagai kegiatan pembangunan. Terlihat pula bahwa proses pembangunan harus tetap dilanjutkan, karena tingkat kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak pernah dicapai secara mutlak. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan oleh negara untuk terus menerus menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (masyarakat) atau negara (negara) selalu berusaha untuk mengembangka kelangsungan hidupnya untuk masa kini dan masa depan. Dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Proses kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Setiap negara selalu berusaha untuk apa yang disebut pembangunan. Proses pembangunan memiliki tiga tujuan dari pendapat ahli ekonomi, bahwa tiga tujuan tersebut yaitu peningkatan pendapatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Noor, 2019).

3. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan sangatlah penting, sebagaimana dikemukakan oleh Nasution yang dengan tegas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan merupakan faktor utama dalam *good governance* yang memberikan manfaat besar, diantaranya meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, menjamin ketercapaian tujuan, menjamin keterlanjutan pembangunan, serta menjamin terakomodasinya suara kelompok marjinal.

Partisipasi dalam proses pembangunan, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa, adalah hal yang sangat penting. Pemerintah masih terkesan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan

pembangunan. Masyarakat tidak cukup dilibatkan dalam proses pembangunan namun lebih dari itu masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan.

Conyers mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi sangat penting:

Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek akan gagal. *Kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. *Ketiga*, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Tujuan dasar dari partisipasi masyarakat menurut Nasution adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, kerana dengan melibatkan masyarakat, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan

kelompok tertentu, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu kebijakan.

Di Indonesia ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan disebut Musyawarah Pembangunan (Musrenbang). Dasar dari diselenggarakannya Musrenbang adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. sedangkan secara teknis dijelaskan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2011 dan No.050/166/sj/2011. MusrenbangDes merupakan forum tahunan yang diadakan oleh Pemerintah Desa untuk merancang program-program pembangunan yang akan dilakukan di wilayahnya dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Program pembangunan yang akan direncanakan mengacu pada RPJMDes Kabupaten dan jumlah APBDes dimana salah satu sumber terbesar dari APBDes tersebut berasal dari bantuan keuangan Kabupaten yang biasa disebut Alokasi Dana Desa. konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis.

Berdasarkan pada pemahaman Serry R Arnsterin dalam jurnal The American Institute of Planners, dengan judul A Ladder Of Citizen's Participation, membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 4 tingkatan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan pada kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat, dari tingkat partisipasi tertinggi hingga tingkat partisipasi terendah sebagai berikut:

1. *Manipulation*

Merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak pernah terjadi.

2. *Theraphy*

Pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat dari pada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

3. *Informing*

Pemegang kekuasaan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggungjawab

dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat.

4. *Consultation*

Masyarakat tidak hanya diberi tahu, tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.

Sejalan dengan penjelasan 4 tingkat partisipasi tersebut, berdasarkan pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi partisipasi tersebut terbagi 3 kelompok besar, (1) tidak ada partisipasi sama sekali (*non participation*) yang meliputi *manipulation* dan *therapy*, (2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (*degrees of tokenism*) meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*, (3) Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (*degres of citizen power*) meliputi *partnership*, *delegated power* dan *citizen power*.

F. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan dan pelebaran pokok permasalahan agar penelitian ini dapat terarah sehingga tujuan penelitian akan dapat tercapai. Ruang lingkup penelitian ini tersebut, sebagai berikut:

1. Menetapkan target atau tujuan.
2. Merumuskan keadaan saat ini.
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode Deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci masalah sosial tertentu. Kualitatif merupakan tatacara yang menghasilkan data deskriptif analisis, ialah apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suasana yang utuh. Maka dari itu, penelitian deskriptif kualitatif studi kasusnya merujuk pada pendeskripsian secara teratur serta mendalam mengenai gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dan sesuai apa yang ada dilapangan studinya. (Sutopo: 2002).

Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Moleong(2001: 5), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pada penelitian kualitatif diharapkan galian datanya lebih mendalam serta mempelajari setiap perilaku subyek yang akan diteliti secara kritis, empiris, dan sistematis.

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang mengampu pada penyusunan laporan penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus perhatian dan permasalahan maka penelitian ini akan dilakukan di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan adanya ketersediaan data yang bisa membantu jalannya penelitian, serta penulis ingin mengkaji masalah penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh Pemerintah Kalurahan sebagai objek yang dapat dipercaya (*Credible*).

b. Subyek Penelitian

Penelitian menentukan informan yang dianggap mempunyai kewenangan dan pengetahuan yang berhubungan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini informannya meliputi : Lurah, perangkat desa, dukuh, dan tokoh masyarakat akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Subjek Penelitian

No	Nama Narasumber	Umur	Tingkat pendidikan	Pekerjaan/jabatan
1.	M. Hanan Amshori, S.IP	51	S1	Lurah
2.	Rina Nur Hasanah, S.Pd	38	S1	Carik
3.	Heri Yanto	35	SMK	Kasi Perencanaan
4.	Suranta	51	SLTA	Dukuh
5.	Sulastri	45	SMA	Anggota PKK
6.	Suroto	60	SMA	Ketua Kelompok Tani (Kapoktan)
7.	Kartini	50	SMA	Ketua UMKM
8.	Gunawan	31	SMP	Ketua Karang Taruna

Sumber : Data Penelitian di Lapangan, 2023

2. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi(pengamatan)

Syaodih N (2006: 220) menjelaskan bahwa, observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Nasution (2003: 56) mengatakan bahwa, observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang kaitannya dunia kenyataan yang diperoleh melalui pengamatan.

Oleh karena itu, observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

Dengan ini, penelitian akan melakukan observasi di Kalurahan Nglindur sebagai tempat dari penelitian ini. Penelitian mengamati problematika penyusunan perencanaan pembangunan desa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pembicaraan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengungkapkan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang menyampaikan jawaban (Moleong: 2001: 135). Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang dianggap mempunyai pengetahuan untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi asal kata nya dokumen yang berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang artinya mengajar. Dalam bahasa Inggris disebut *document*, yaitu “*something written or printed, to be used as a record or evidence*” atau sesuatu yang tertulis serta dicetak untuk digunakan sebagai catatan dan bukti. (Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2013: 146)

Untuk kebutuhan penelitian, penulis membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan mungkin pendukung suatu kebenaran. Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Problematika penyusunan perencanaan pembangunan desa.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum masuk ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution (dalam Sugiyono, 2015: 245) mengatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan terus berlangsung sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih berfokus pada proses selama di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data”.

Sugiyono (2010) menguraikan bahwa analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan

Huberman (dalam Sugiyono: 2015) dengan dasar analisis data dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis data yang dilakukan untuk merangkum dan mereduksi hasil-hasil penelitian dengan menitik beratkan pada hal-hal yang dianggap perlu dan penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang sudah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci.

2. Display Data

Display data merupakan data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara menyeluruh dan terperinci. Selanjutnya, dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya di susun dalam bentuk uraian atau laporan yang sesuai dengan hasil penelitian di peroleh.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dinalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Demikian prosedur pengolahan data yang

dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan tahap-tahap ini diharapkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.

BAB II
GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON
GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Sejarah

Kalurahan Nglindur adalah salah satu Kalurahan yang ada di Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan kronologi historis pemerintahan, Kalurahan Nglindur berdiri atau mulai tersusun bentuk pemerintahan mulai tahun 1929. Hal ini dapat dilihat dari suksesi kepemimpinan di Kalurahan Nglindur yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 1925 M, belum dikenal pemerintahan setingkat Kapanewon, pada saat itu baru berupa kademangan yang dipimpin oleh Demang. Demang membawahi Bekel, sedangkan di bawah Bekel ada sub pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Congkok. Dengan demikian, bentuk pemerintahan saat itu masih sangat sederhana. Sehingga komunitas masyarakat Nglindur saat itu sudah terbentuk yang dipimpin oleh seorang Bekel, namun belum mengenal sistem pemerintahan.
2. Pada tahun 1926 M terbentuk Kematren yang dipimpin oleh Mantri Pangreh Prodjo yang berkedudukan di Jerukwudel. Kematren ini setingkat dengan Kapanewon sekarang, saat itu dijabat oleh Rng. Hardjowidarso.
3. Pada tahun 1929 Kematren di Jerukwudel berubah menjadi Order Distrik (masa Belanda) yang berada di bawah Kawedanan. Pejabat Order Distrik

Rongkop berkedudukan di Jerukwudel dengan kantor samping pasar Rancah. Pimpinan order distrik disebut Asisten Wedono. Asisten Wedono yang memerintah pertama kali di wilayah order distrik Rongkop yang berada di Jerukwudel bernama Rng. Harjodikoro. Secara berturut-turut sebelum Ibukota order distrik pindah ke Baran, Semugih Asisten Wedono yang memerintah dengan ibukota di Jerukwudel adalah: Rng. Hardjo Sumantri, pada tahun 1940-an ibukota pindah ke-Semugih.

4. Bersamaan dengan bentuk Order Distrik menjadi pengganti Kematren, di Nglindur dibentuk pemerintahan dibawah kematren dengan nama Kalurahan Nglindur yang di perintah oleh Lurah Kalurahan yang di bantu Pamong Kalurahan dengan nama Carik, Kamituwo, Bayan, Jogomirudo, Jogoboyo, Moden dan para Antek (Antek: pembantu pamong kalurahan dan diluar struktur pemerintahan).
5. Kronologi terbentuknya pemerintahan di Nglindur tersebut dapat diketahui bahwa Kalurahan Nglindur memulai pemerintahan Kalurahan sejak tahun 1915, sebelum tahun 1915 komunitas masyarakat dipimpin oleh seorang Bekel. Selanjutnya kepemimpinan di Kalurahan Nglindur berturut-turut sebagai berikut:
 - a. Sampai tahun 1915 dipimpin Bekel. Belum dapat diketahui Bekel yang memimpin saat itu sejak kapan Kalurahan Nglindur dipimpin bekel belum dapat diketahui secara jelas.
 - b. Pada tahun 1915 - 1926 dipimpin Lurah Kalurahan KertomSemito
 - c. Pada tahun 1927 - 1946 digantikan Lurah Kromo Wijoyo

- d. Pada tahun 1946 - 1956 dipimpin Lurah HS Suparno
- e. Pada tahun 1956 - 1965 dipimpin Lurah Parto Wijoyo
- f. Pada tahun 1966 - 1985 dipimpin Lurah Karso Pawiro.
- g. Pada tahun 1985 - 2004 dipimpin Lurah Edy Warsito
- h. Pada tahun 2004 - 2014 dipimpin Lurah Sujana
- i. Pada tahun 2014 - bulan Juni 2015 dijabat Pejabat Lurah Suprpta.
- j. Bulan Juni 2015 - Desember 2015 dijabat Pejabat Lurah Suharyato.
- k. Pada tahun 2016 - 2022 dipimpin oleh Lurah Supriyana.

A. Geografis

Kalurahan Nglindur adalah salah satu Kalurahan dari 144 Kalurahan yang berada di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Nglindur terletak di Kapanewon Girisubo, tepatnya disebelah tenggara Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak dari pusat Ibukota Kabupaten Gunungkidul sejauh 32km. Luas wilayah kalurahan Nglindur adalah 617.5630 Ha. Batas wilayah Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kalurahan Semugih Kapanewon Rongkop.
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop.
3. Sebelah Selatan :berbatasan dengan kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo.

4. Sebelah Timur :berbatasan dengan Kalurahan Melikan Kapanewon Rongkop.

Kalurahan Nglindur terletak dengan ketinggiannya bervariasi antara 500 – 700m diatas permukaan laut. Lahan Kalurahan Nglindur mempunyai tingkat kemiringannya bervariasi. Curah hujan rata-rata sebesar 1.382mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89hari. Bulan basah 4 - 5bulan, untuk bulan kering berkisar 7 - 8bulan. Musim hujan dimulai pada Oktober – November dan berakhir pada Maret - April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada Desember–Februari. Suhu udara rata-rata harian 27,7°C, dan maksimum 32,°C. Kondisi Kalurahan Nglindur merupakan lahan kering dengan bentangan pegunungan dan struktur batu bertanah. Hingga saat ini belum ditemukan sumber air, sehingga kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan dengan air mengandalkan curah hujan saja. Potensi untuk tanaman lahan kering palawija dan padi gogo, tanaman buah-buahan (sirsak, srikoyo, pisang, dan lain sebagainya), budidaya perikanan perairan darat (telaga) serta usaha budidaya ternak (pembibitan dan penggemukan).

B. Demografi

Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 2.740 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.339 jiwa dan perempuan sebanyak 1.401 jiwa. Jumlah penduduk kepala keluarga

sebanyak 784 kepala keluarga dan persentase *sex ratio/rasio* jenis kelamin penduduk Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo sebesar 93,47%.

1. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 2. 1

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Komposisi Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil/PNS	31
2	Pamong Kalurahan	18
3	Wiraswasta	48
4	Swasta	75
5	Buruh bangunan	195
6	Buruh tani	103
7	Petani	851
8	Pengusaha	23
9	Lain-lain	35
	Total	1.344

Sumber: Monografi kalurahan nglindur, 2023.

Dari tabel 2.1 tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Nglindur memiliki mata pencaharian utama sebagai petani yaitu sebanyak 851 jiwa atau 63,3%, dari jumlah penduduk yang memiliki lapangan pekerjaan buruh bangunan yaitu sebanyak 195 jiwa atau 14,5%, sementara itu yang bekerja sebagai buruh tani adalah 103 jiwa atau 7,7% dan bekerja disektor swasta sebanyak 75 jiwa atau 5,6%.

2. Pendidikan

Taraf pendidikan masyarakat Kalurahan Nglindur rata-rata termasuk kategori cukup tinggi, data mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2

Statistik Penduduk Kalurahan Nglindur

No	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	252	211	463
2	Tamat SLTP/Sederajat	394	381	775
3	Tamat SLTA/Sederajat	537	519	1.056
4	Tamat Perguruan Tinggi	109	97	206
	Total			2.500

Sumber: Monografi Kalurahan Nglindur, 2023.

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa taraf pendidikan masyarakat Kalurahan Nglindur rata-rata cukup tinggi, untuk tamatan SLTA keatas sebanyak 1.262 orang.

3. Agama

Tabel 2. 3

Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan di Kalurahan Nglindur

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.740
2	Katholik	-
3	Kristen	-

4	Hindu	-
5	Budha	-
	Total	2.740

Sumber: Monografi Kalurahan Nglindur, 2023.

Dari tabel 2.3 tersebut diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kalurahan Nglindur mayoritas terdiri Agama Islam yaitu sebanyak 2.740 jiwa. Sedangkan tempat ibadah yang tersedia di Kalurahan adalah Masjid sebanyak 8 buah.

C. Kesehatan

Dalam penerapan hidup bersih dan sehat di masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, tercermin dalam meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, Kalurahan Nglindur tidak ditemukan kematian bayi dan ibu, sedangkan bayi dibawah garis merah terdapat 0 orang. Sedangkan sarana kesehatan di Kalurahan Nglindur terdiri dari Puskesmas Pembantu sebanyak 1 buah, Poskesdes sebanyak 1 buah dan Posyandu sebanyak 8 buah.

D. Transportasi

Alat transportasi yang ada, berfungsi untuk menghubungkan Kalurahan Nglindur didalam wilayah nya, juga penghubung dengan di luar wilayah. Jalur jalan yang menghubungkan Kalurahan atau kota di wilayah tersebut mudah dijangkau oleh angkutan transportasi. Jalan di wilayah Kalurahan Nglindur umumnya sudah perkerasan dan dapat dijangkau walaupun masih ada sebagian ruas jalan yang masih perlu diperbaiki.

E. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kalurahan Nglindur yang dikembangkan yaitu kuliner, minat khusus dan wisata budaya. Kalurahan Nglindur memiliki berbagai potensi seni budaya yang sekarang ini masih tumbuh dan berkembang dengan pesat, di iringi dengan pembinaan rutin baik oleh pemerintah maupun swasta. Potensi seni yang ada antara lain adalah:

- a. Adat atau tradisi :Bersih Kalurahan, Rasul Padukuhan, Gumbregan, Mitoni, Puputan, wiwitan, ngirim wedak, singgulan dan lain sebagainya.
- b. Seni pertunjukan: ketroprak, wayang kulit.
- c. Seni musik: karawitan, gejog lesung, thoklik dan hadroh.
- d. Seni tari: tari tradisional, sendra tari, reog dan kesenian jathilan.

F. Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan Nglindur terdiri dari Lurah beserta Pamong Kalurahan. Pamong kalurahan terdiri atas Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Carik, Urusan Teknis, dan Unsur Kewilayahan. Pamong Kalurahan yang bertanggung jawab kepada Lurah dan membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Peraturan Kalurahan Kalurahan Nglindur Nomor 1 Tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan Nglindur. Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Adalah:

1. Lurah;

2. Carik, yang membawahi:
 - a. Kepala urusan Tata Laksana
 - b. Kepala urusan Danarta.
 - c. Kepala urusan Pangripta.

Urusan Teknis yang terdiri dari:

- a. Jagabaya.
- b. Ulu-ulu
- c. Kamituwa

Urusan wilayah terdiri dari:

Dukuh

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, di dukung dengan Pamong Kalurahan Nglindur sebanyak 18orang dan 2orang Tenaga Harian Lepas. Adapun data Pamong Kalurahan Nglindur sesuai dengan tingkat pendidikan sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4

Data Pamong Kalurahan Menurut Tingkat Pendidikan di Kalurahan Nglindur 2022

no	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	-
2	Tamat SMP	1
3	Tamat SMA/SMK Sederajat	12
4	Sarjana/S1	5
	Total	18

Sumber : Monografi KalurahanNglindur, 2023.

Jumlah Pamong Kalurahan Nglindur sampai dengan Tahun 2021 secara *minus growth* dan *zero growth*, dengan mempertimbangkan jumlah Pamong Kalurahan yang pensiun, diberhentikan serta memperhatikan hasil analisis kinerja dan melaksanakan penerimaan pegawai dengan jumlah sama dengan pegawai yang berhenti. Data dapat digunakan untuk alur kebijakan rekrutmen Pamong Kalurahan pada masa yang akan datang. Data dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 5

Proyeksi Jumlah Pamong Kalurahan Nglindur Tahun

No	Proyeksi Pegawai Negeri Sipil/PNS	Jumlah	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	<i>Minus Growth</i>		18	18	18	18
2	<i>Zero Growth</i>		18	18	18	19

Sumber: Monografi Kalurahan Nglindur, 2023.

Kalurahan Nglindur dalam penyelenggaraan pemerintahan secara administratif terbagi dalam 8 Padukuhan, 8 RW, dan 28 RT. Pemilihan RT dan RW dilakukan secara demokratis melalui rembung masyarakat. Demokrasi tersebut sebagai bentuk perwujudan demokrasideliberatif yang secara turun temurun dilakukan sejak jaman lampau, musyawarah juga tidak pernah melibatkan politik uang. Pembagian administratif

Kalurahan Nglindur secara lengkap sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Daftar Padukuhan, RW, RT Kalurahan Nglindur
Tahun 2022

No	Padukuhan	RW	RT
1	Nglindur wetan	01	1.01
			2.02
			3.03
			4.04
2	Sumur	02	1.05
			2.06
			3.07
			4.08
3	Nglindur Kulon	03	1.09
			2.10
			3.11
			4.12
4	Ngepoh	04	1.13
			2.14
			3.15
			4.16
5	Gangsalan Kidul	05	1.17
			2.18
			3.19
			4.20
6	Gangsalan Lor	06	1.21
			2.22

7	Wuni	07	1.23 2.24 3.25 4.26
8	Tekik	08	1.27 2.28

Sumber: Monografi Kalurahan Nglindur, 2023

Dalam usahanya meningkatkan pelayanan masyarakat, diselenggarakan Pelayanan Satu Pintu dengan menggunakan pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien, dan ekonomis, adil serta tepat waktu. Pelayanan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif dikalangan masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan simpati masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan Kalurahan Nglindur.

Adapun jenis pelayanan, perizinan dan pelayanan non-perizinan yang melalui pelayanan satu pintu adalah:

1. Pengantar KK
2. Pengantar KTP
3. Pengantar SKCK
4. Pengantar Perjalanan
5. Pengantar Kehilangan
6. Pengantar Izin Kehilangan
7. Pengantar Izin Keramaian
8. Pengantar Nikah, Talak, dan Cerai
9. Pengantar Dispensasi Nikah

10. Pengantar izin Pendirian Bangunan
11. Pengantar Izin HO
12. Surat Izin Usaha.
13. Surat-surat Keterangan
14. Pengantar Sertifikat Tanah.
15. Surat Penelitian.
16. Surat Kelahiran.
17. Surat Kematian.
18. Legalisasi (perbankan, pertanahan).

Pelayanan perijinan dan non-perijinan yang diterbitkan sebagai standar prosedur pelayanan yang baik untuk membantu masyarakat dalam mengurus segala perijinan tidak lepas dari standar waktu yang telah ditentukan sehingga penerbitan surat-surat dapat dikerjakan dengan tepat waktu. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, pelayanan birokrasi yang murah, cepat, berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan publik sudah menjadi kebutuhan umum.

G. Visi Misi

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2027, visi Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo adalah:

Visi :

Sejalan dengan visi daerah Kabupaten Gunungkidul, maka visi Kalurahan Nglindur adalah:

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan Guna Mewujudkan Masyarakat Kalurahan Nglindur yang Bertaqwa, Berbudaya, Bermartabat dan Sejahtera”.

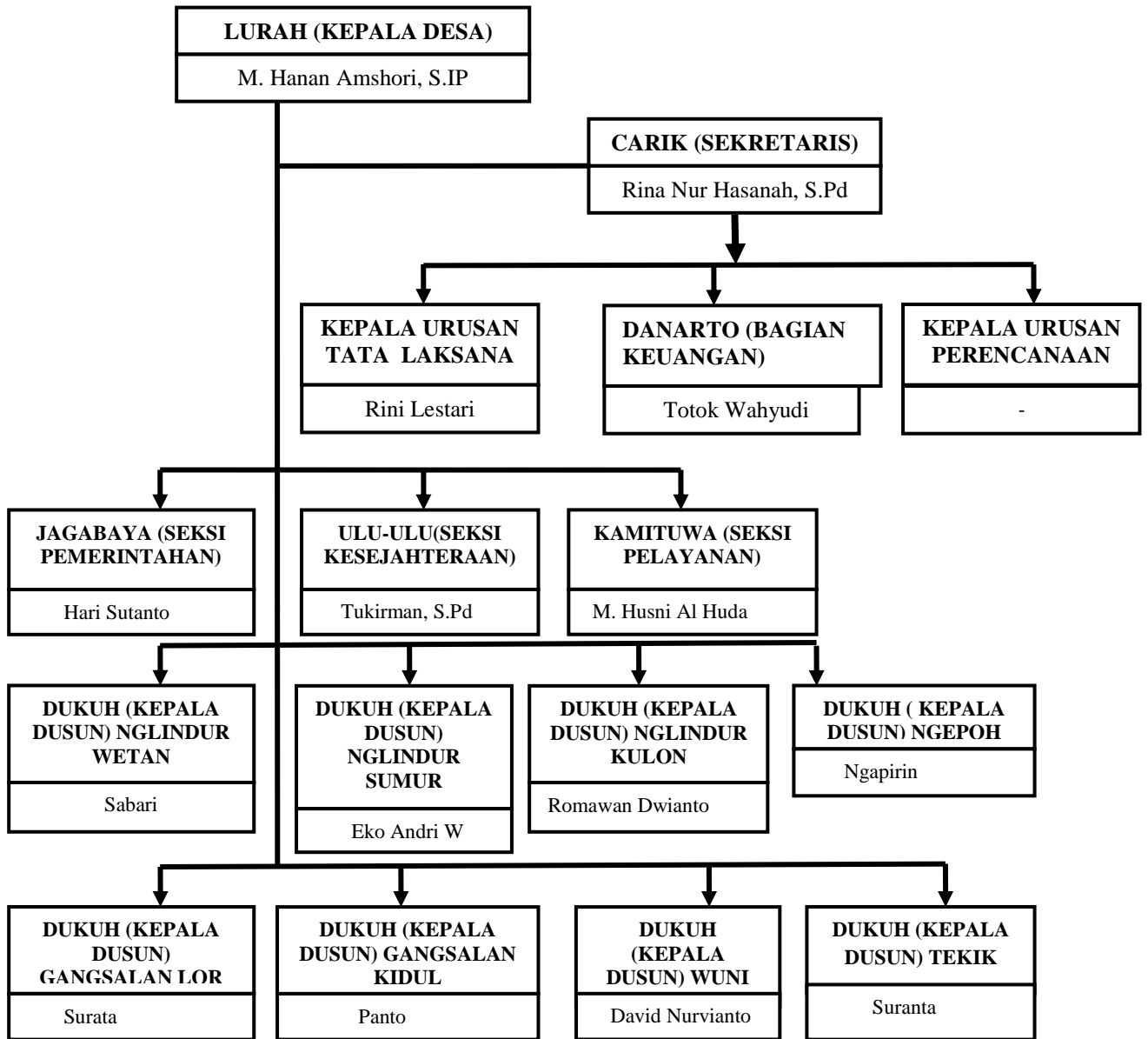
Misi:

Misi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan organisasi guna mewujudkan kemajuan, kesejahteraan berkeadilan yang dirumuskan dan dilaksanakan melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat, misi Kalurahan Nglindur adalah:

1. Mengoptimalkan pemerintah bersih dan transparan.
 - a. Tujuan: Terwujudnya reformasi tatakelola Pemerintahan Kalurahan.
 - b. Sasaran: Kapasitas tatakelola pemerintahan meningkat, Masyarakat, Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Pemerintahan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
2. Meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama
 - a. Tujuan: Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.
 - b. Sasaran: Seluruh Warga Kalurahan.
3. Menggali potensi sumber daya manusia yang berbudaya.
 - a. Tujuan: Mengembangkan kualitas individu dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
 - b. Sasaran: Tidak adanya anak putus sekolah, tumbuh nya kelompok keterampilan baru, tersedianya TTG pertanian dan peternakan.

4. Meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi masyarakat.
 - a. Tujuan; terwujudnya pembangunan ekonomi, pendidikan ekonomi, pertanian, kesehatan serta sarana dan prasarananya.
 - b. Sasaran: Pos Layanan teknologi tepat guna, partisipasi sosial warga, optimalisasi sumberdaya alam dan sumber daya manusia.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam kehidupan masyarakat.
 - a. Tujuan: Terwujudnya Kehidupan Demokrasi.
 - b. Sasaran: Pusat Informasi Kebijakan.

H. Struktur Organisasi



Sumber: Monografi Kalurahan Nglindur, 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan pembangunan desa merupakan rumusan mengenai tahapan yang harus dilalui dalam mengidentifikasi masalah, potensi dan kebutuhan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat untuk dijadikan program/kegiatan yang didanai dengan uang publik. Hal tersebut bisa dikatakan sudah terlaksana walaupun belum maksimal. Seperti keterlibatan warga masyarakat dalam Musrenbang Desa, karena Musrenbang Desa bukan hanya sekedar terlibat atau hadir begitu saja, akan tetapi aktif dalam memberikan masukan atau usulan agar pembangunan desa bisa dilaksanakan dengan baik.
2. Pemerintah Kalurahan Nglindur dalam proses perencanaan pembangunan desa sudah terlaksana dengan baik namun masih ada yang belum optimal di dalam merumuskan target perencanaan bahkan bembanguna. Pelaksanaan program tidak terlaksana dengan baik karena dalam merumuskan perencanaan tidak memuat target yang konkrit,

sehingga kegiatan-kegiatan yang di jadikan program tidak berjalan maksimal.

3. Untuk mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dalam perencanaan pembangunan di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini menyusun perencanaan sudah melihat dan memperhatikan kemampuan ataupun masalah yang akan dijadikan sebagai program kegiatan pembangunan desa walaupun dalam pelaksanaannya tidak maksimal. Selain itu, berkaitan dengan mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dalam penyusunan perencanaan tentunya Pemerintah Kalurahan sudah mempersiapkan segala sesuatu nya agar pembangunan tidak terhambat dan bisa berjalan dengan baik.
4. Dalam mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan Pemerintah Kalurahan Nglindur mampu memberikan jalan tengah atau alternatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian, evaluasi terhadap kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya tentu yang menjadi fokus akhir dan penting dilakukan. Agar kegiatan atau program pada tahun-tahun sebelumnya tidak terlaksana dengan baik bisa terlaksana pada tahun ini dan bahkan tahun berikutnya kerana dilakukannya evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya.

B. Saran

1. Diharapkan pada Musrenbang Kalurahan masyarakat harus aktif memberikan masukan dan usulan.
2. Pada tahapan perumusan target dalam perencanaan pembangunan harus sesuai dengan dokumen yang ada, dokumen yang di maksud RPJM Desa.
3. Pentingnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang di tahun sebelumnya.
4. Adanya peningkatan kinerja perangkat desa, demi terselenggranya program-program kerja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Suwaryo, Mudiwati, 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja* Volume. 3 No. 2. Universitas Padjadjaran, Jawa Barat.
- Akbar, Hermawan, dan Karlina, 2019. Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* Vol. 10. No. 02. Fakultas ISIP, Universitas Garut.
- Ariadi, Andi, 2019. Perencanaan Pembangunan Desa. STIA Al Gazali Barru Sulawesi Selatan.
- Chotimah, Chusnul, Rohmad, dan Trisakti, 2019. Efektifitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum* Volume 4. Nomor 2, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.
- Dani, Sofia, dan Donald, 2020. Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 2, No. 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi.
- Desan, 2023. *Skripsi*. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Budaya Di Desa Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Program Studi Ilmu Pemerintahan, STPMD “APMD” : Yogyakarta.

- Hadawijaya, Rafi'atul, Indra, dan Beby 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Karang Gading. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2): 192-200. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia.
- Hendrawati, Erna, Mira, dan Khoirul 2021. Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Di Desa Setro Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik. *Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK* Vol. 5, No. 2, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Herman, 2019. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majane. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Vol. 1, No. 1. STIE Muhammadiyah Mamuju.
- Kamaruddin, Suhaima, dan I Nyoman 2021. Analisis Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 9, No. 1, Pusat Riset dan Publikasi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Samawa, Sumbawa Barat.
- Manghayu, Agung 2018. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan* Vol. 5, No. 2, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nain, Umar, 2017. *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta

- Novi, Novianti, dan Lintje, Kalangi 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1), 83-90. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- Raharjo, Mu'iz, dan Muhamad, 2021. *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintah Desa*. Teori, Regulasi, dan Implementasi. Rajawali Pers: Depok.
- Rudiadi, Ilosa, Abdiana dan Saipul, 2021. Optimasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 12, No. 1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Setiawan, Ferry, 2023. *Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) di Desa Tumbang Bantian*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia.
- Prihantara, Eka, Wahyu, 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) di Kalurahan Kemiri. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- Wiguna, Rosmala, dan Nina, Angelia 2019. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia.

L

A

M

P

I

R

A

N

FOTO DOKUMENTASI



Kantor Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo

Kabupaten Gunungkidul



**Wawancara dengan Bapak M. Hanan Amshori Selaku
Lurah Kalurahan Nglindur**



**Wawancara dengan Ibu Iriana Nur Hasanah Selaku Carik
Kalurahan Nglindur**



**Wawancara dengan Bapak Heriyanto Selaku Kasi Perencanaan/Pamong
Kalurahan Nglindur**



**Wawancara dengan Bapak Suranta Selaku
Dukuh Padukuhan Tekik**



**Wawancara dengan Ibu Sulastri Selaku Anggota PKK/Perwakilan
Perempuan Kalurahan Nglindur**



**Wawancara dengan Bapak Gunawan Selaku Ketua Karang Taruna
Padukuhan Tekik**



Wawancara dengan Bapak Suroto Selaku Ketua Kelompok Tani

Kalurahan Nglindur



Wawancara dengan Ibu Kartini Selaku Ketua UMKM Kalurahan

Nglindur



LURAH NGLINDUR
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
KALURAHAN NGLINDUR TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLINDUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Lurah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Kalurahan dan keuangan Kalurahan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BAMUSKAL
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJMKal) TAHUN 2022 - 2027

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. M. HANAN AMSHORI, S.IP. : Lurah Nglindur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Nglindur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Drs. SUGENG WIBOWO, MPd.I. : Ketua Bamuskal Kalurahan Nglindur.
PRAPTO PRAYITNO : Wakil Ketua Bamuskal Kalurahan Nglindur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Nglindur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

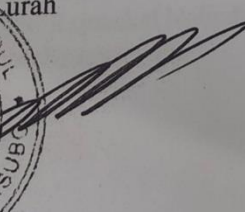
Menyatakan bahwa:

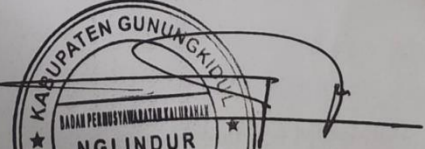
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) 2022 – 2027 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) 2022 – 2027 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) 2022 – 2027 menjadi Peraturan Kalurahan apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Panewu Girisubo untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua BAMUSKAL,

Lurah

M. HANAN AMSHORI, S.IP.


Drs. SUGENG WIBOWO, MPd.I

